



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN
SUB UNIT KERJA : KECAMATAN MATESIH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYONO
2. Jabatan : CAMAT MATESIH
3. NHK : 21324

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.298.000.000**

1. Tanah Seluas 3560 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 178.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 217 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 295 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
6. Tanah Seluas 607 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 125.000.000**

1. MOBIL, HONDA CITY CAR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX 155 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 4.800.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	186.455.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.614.255.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.614.255.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.